

BATAS WILAYAH PADA MASA AMAN DAN GAWAT

Oleh:

Soemantri Wardoyo

Guru Besar Jurusan Pendidikan Geografi, FISE UNY

Abstrak

Pada era pembentukan bumi hanya ada perbedaan wilayah menjadi massa darat, perairan, dan udara. Massa darat dan perairan dipisahkan oleh garis yang merupakan kedudukan air persentuhan dengan daratan disebut garis pantai. Bulatan bumi di kenal sebagai massa yang utuh, merupakan satu kesatuan. Barbara Ward dan Rene Dubos (1976) menulis buku dengan judul: *Hanya Satu Bumi - (Only One Earth)*. Makna judul tersebut mengisyaratkan bahwa bumi tempat manusia hidup itu terbatas. Pembatas yang dimaksud berkenaan dengan nilai guna untuk kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu perlu ada tindakan penghematan dan pelestarian.

Secara alamiah muka bumi dapat dibedakan berdasar kenampakan yang ada padanya. Penamaan kewilayahan ditetapkan berdasar adanya unsur yang dapat memberi tanda pembeda satu wilayah dengan yang lain. Wilayah (region) yang memiliki kesamaan kenampakan dominan dijadikan dasar untuk memberi nama. Pada umumnya suatu wilayah diberi nama berdasar kesamaan dan perbedaan yang terdapat di dalamnya.

Adanya kesamaan dan perbedaan yang ada pada wilayah tertentu menjadi referensi pemberian nama. Persebaran kesamaan dijadikan batas dari kategori ada sampai tidak ada. Kenampakan yang sama di muka bumi, misal: tinggi tempat, menghasilkan kenampakan: dataran rendah, dataran tinggi, bukit, atau gunung. Pada wilayah yang mengalami peristiwa yang sama menghasilkan kesamaan nama: dataran banjir, daerah pasang surut, dan lainnya. Perbedaan satu wilayah dengan yang lain diperlukan pembeda yang pasti, dari sinilah menghasilkan konsep batas wilayah, dengan pernyataan "dari" - "sampai" .

Kata kunci: persamaan, perbedaan, batas

Pendahuluan

Muka bumi tempat hidup manusia dan makhluk biotis lainnya, menunjukkan adanya kesamaan dan perbedaan. Kesamaan dan perbedaan tersebut meliputi ciri-ciri alamiah maupun kultural. Bentang alam yang belum mendapat campur tangan manusia disebut bentang alam natural (*natural landscape*), sedangkan yang sudah mendapat campur tangan manusia disebut bentang alam kultural (*cultural landscape*). Kedua bentuk bentang alam tersebut masing-masing dapat diketahui ada kesamaan dan perbedaan.

Peristiwa yang terjadi di muka bumi lambat atau cepat menghasilkan bentuk-bentuk yang berbeda antara wilayah satu dengan yang lain. Demikian pula campur tangan manusia dengan teknologi hasil budaya akan menghasilkan pewilayahan yang berbeda satu sama lain. Kehidupan dan penghidupan manusia diperoleh dengan mengolah sumber-sumber yang tersedia di alam. Pada saat manusia "mengambil" sumber alam dengan teknologi yang dimiliki menyebabkan adanya perubahan bentuk muka bumi. Menggunakan daya nalar menghasilkan ide, realisasi ide adalah kegiatan, dan setiap kegiatan menghasilkan apa yang diperlukan, inilah yang disebut kebudayaan (*culture*) oleh Kuntjaraningrat (1974 : 15).

Muka bumi secara alamiah sudah menunjukkan adanya perbedaan dan kesamaan. Dengan adanya campur tangan manusia akan memperbanyak, mempercepat, dan mempertajam adanya perbedaan-perbedaan tersebut. Atas dasar kenyataan tersebut, muka bumi dapat dibagi menjadi wilayah yang secara nyata dapat dibedakan. Satu satuan wilayah dengan wilayah lain dipisahkan atau dibedakan dengan batas-batas yang jelas. Dengan demikian ada wilayah yang dinyatakan "di dalam" dan ada wilayah "di luar" atau dapat pula disebut "termasuk" dan "tidak termasuk".

Pembahasan perihal batas wilayah dalam tulisan ini meliputi: pengertian, fungsi, jenis, dan issue penting berkenaan dengan batas wilayah dewasa ini.

Pengertian

Muka bumi dengan nyata dapat dibedakan berdasar kenyataan yang terdapat padanya. Kenyataan tersebut berbeda satu sama lain. Pada waktu jumlah manusia sebagai penghuni bumi masih sedikit, wilayah kekuasaannya hampir tidak ada batas. Mereka bebas bergerak (migrasi) dari satu tempat ke tempat lain, dapat berbuat apa saja yang mereka mau terutama berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pokok hidupnya. Hidup berpindah-pindah mengindikasikan peluang pilihan tempat untuk tinggal. Wilayah hunian segera ditinggalkan ketika sudah tidak atau kurang memberi manfaat. Pada waktu jumlah manusia sesama penghuni bumi masih sedikit, kebiasaan tersebut tidak menghadapi hambatan maupun kesulitan. Pada waktu penghuni bertambah banyak, kebutuhan wilayah untuk berpindah makin banyak. Kelompok satu dengan yang lain mempunyai kepentingan yang sama untuk menguasai wilayah bagi pemenuhan kebutuhan hidupnya. Kelompok yang kuat akan menguasai lebih luas dan yang lemah terdesak. Dengan demikian luas wilayah kekuasaan menjadi berkurang karena terdesak oleh yang lain. Sekalipun demikian batas kekuasaan atau kedaulatan tersebut belum diberi tanda-tanda tertentu. Wilayah perbatasan dengan kelompok lain disebut zona tapal batas ("*FrontierZone*"). Kelompok-kelompok tersebut makin banyak, anggota kelompok juga bertambah. Mereka membentuk kelompok yang menempati suatu satuan wilayah, berdaulat atas wilayah tersebut, bersebelahan dengan kelompok lain yang juga berdaulat atas wilayahnya.

Kelompok membangun kekuatan masing-masing dengan ketentuan yang diakui oleh anggotanya, melahirkan bentuk "pemerintahan" dengan wilayah kekuasaan dan kedaulatan yang jelas. Penetapan wilayah kekuasaan dapat diperoleh secara damai, tetapi tidak sedikit harus diperoleh melalui jalan perang. Hasil akhir adalah kesepakatan wilayah mana yang menjadi bagian kekuasaan dan wilayah mana yang menjadi milik kelompok lain. Kesepakatan tersebut berupa kesepakatan verbal dan secara fisik dapat dinyatakan dalam bentuk kenampakan fisik, misal: sungai, igir atau berupa

patok berjajar membentuk garis. Wilayah yang berada bersebelahan atau dalam satu garis adalah wilayah kedaulatan, sedangkan yang berada di luar garis merupakan wilayah kedaulatan lain.

Batas dapat diberi pengertian:

Merupakan tanda yang menunjukkan tempat kedudukan di mana kedaulatan suatu negara itu berakhir dan negara lain mulai

"Boundaries indicate where the sovereignty of one state ends and that another begins" (Getis/Getis/Fellmann, 1988 : 246)

Fungsi

Penetapan batas wilayah memberi kepastian bagian mana yang menjadi kekuasaan dan bagian mana yang tidak termasuk. Batas menjadi pemisah antara dua satuan wilayah dengan tegas. Kedaulatan menjadi penting tidak hanya terkait dengan kedaulatan suatu negara, tetapi juga terkait dengan hak atas isi yang terdapat di dalam, di permukaan, dan di atasnya.

a. Kepastian hukum

Kedaulatan suatu negara tidak dapat ditetapkan secara sepihak. Bagi negara kepulauan yang berhadapan langsung dengan perairan, untuk menetapkan batas wilayah didasarkan atas Konvensi Jenewa Tahun 1958 mengenai hukum laut. Perbatasan antara dua negara yang dipisahkan oleh perairan laut diatur:

..... Apabila daratan kontinental yang sama berbatasan dengan wilayah dari dua atau lebih negara yang pantainya berhadapan satu sama lain, perbatasan dari daratan kontinental yang tunduk kepada negara-negara itu masing-masing ditetapkan dengan persetujuan bersama (Munadjat Danusaputro, 1980 : 337).

Dua negara atau lebih yang bersebelahan perlu ditetapkan batas-batasnya, sehingga menjadi jelas wilayah kekuasaannya. Dalam ukuran yang kecil, misal: pekarangan satu keluarga, dalam buku tanah hak milik pekarangan atau jenis lahan lain milik perseorangan dengan jelas disebutkan batas-batasnya. Pemilik

melaporkan pekarangan yang dimiliki kepada pemerintah setempat, disepakati oleh tetangga yang bersebelahan kemudian disyahkan oleh Badan Pertanahan Nasional yang ada di Kabupaten/Kota dengan nama Buku Tanah.

Pada tahun 2004-2005, Propinsi D.I. Yogyakarta telah mengajukan permohonan penyusunan peta dan peraturan baru menyangkut batas wilayah DIY-Jateng.

Tahun 2006 Menteri Dalam Negeri Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang tapal batas baru wilayah DIY-Jateng. Dasar dikeluarkannya Permendagri tersebut dalam rangka mempertegas kesepakatan yang telah ada. Arahannya sebagai landasan hukum sesuai UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan penetapan batas wilayah ditetapkan melalui Permendagri (Kedaulatan Rakyat, 2006 : hal 1).

b. Luas

Luas wilayah merupakan konsep esensial dalam studi geografi. Untuk menetapkan luas perlu diketahui panjang dan lebar. Garis yang menunjukkan panjang dan lebar merupakan batas yang memisahkan dengan wilayah bersebelahan. Setelah panjang dan lebar ditetapkan baru dapat dihitung luasnya.

Negara-negara berdaulat di dunia ini berjumlah 207, masing-masing dilaporkan luasnya. Rusia memiliki luas 6. 592.819 mil persegi sehingga merupakan negara terluas di dunia, sedangkan Monaco dilaporkan memiliki luas kekuasaan satu mil persegi (Population Reference Bureau, 2004 : 2)

c. Lokasi

Dalam peta maupun globe digambarkan adanya garis melintang dan membujur yang membagi permukaan bumi. Garis melintang disebut garis lintang, membelah bumi menjadi dua bagian yaitu utara-selatan dihitung dari 0°. Garis lintang 0° atau garis khatulistiwa membagi bumi menjadi belahan bumi utara dihitung dari 0° sampai dengan 90° kutub utara, dan 0° sampai dengan 90° kutub selatan adalah belahan bumi selatan.

Selain itu belahan bumi juga dibagi berdasarkan garis yang berpotongan dengan garis lintang, disebut garis bujur. Garis bujur dihitung dari nol derajat, yaitu garis yang melalui kota Greenwich di Inggris, membagi belahan bumi menjadi belahan bumi barat dan timur.

Kaitannya dengan fenomena alam, garis lintang yang membelah bumi menjadi dua bagian terkait dengan pembagian iklim di muka bumi (Freeman and Ralph, 1949 : 2). Wilayah yang dibatasi oleh persilangan garis lintang dan garis bujur ditetapkan menjadi **lokasi absolut** wilayah tersebut (Getis/Getis/Fellmann, 1988 : 7), sedangkan wilayah satu terhadap yang lain atau kenampakan lain disebut **lokasi relatif**. Lokasi relatif ini menjadi penting terkait dengan hubungan dan saling ketergantungan satu sama lain.

d. Kekayaan

Persebaran kekayaan alam (*resources*) yang terdapat dalam bumi dan di permukaan bumi tidak merata, baik kekayaan alam yang dapat menghasilkan tenaga maupun yang tidak. Barang galian yang menghasilkan tenaga, seperti: minyak bumi, gas alam, batu bara, dan uranium tidak terdapat di semua tempat. Demikian pula barang galian, seperti: besi, tembaga, perak, timah, batu kapur, dan pasir besi. Negara yang wilayah kedaulatannya terdapat banyak muatan kekayaan alam akan memiliki potensi ke arah negara yang kaya dan makmur. Sekalipun negara memiliki luasan wilayah yang besar, tetapi potensi kekayaan alam yang dimiliki rendah dan letaknya tidak mendukung, maka kurang diminati untuk melaksanakan kehidupan dan penghidupan. Padang Pasir Sahara, daratan yang selalu tertutupi es seperti kutub utara, Pulau Hijau di Kanada tidak berpenghuni.

Jenis

Batas wilayah kekuasaan untuk penetapannya dapat digunakan kenampakan yang sudah ada di permukaan bumi atau dibuat oleh manusia.

a. Kenampakan yang sudah ada

Kenampakan fisik yang ada di permukaan bumi, seperti: sungai, perairan, jurang, dan igir pegunungan. Negara-negara di dunia menetapkan batas wilayah memanfaatkan salah satu atau kombinasi dari beberapa kenampakan yang ada di permukaan bumi.

b. Kenampakan buatan

Kenampakan yang sudah ada belum cukup dijadikan sebagai pembatas dua wilayah bersebelahan. Kepastian wilayah kedaulatan harus ditetapkan dengan tanda-tanda buatan, seperti: jalan darat, rel kereta api, tembok pembatas, gapura, patok, dan tanaman pagar yang sering digunakan untuk pembatas wilayah.

c. Kombinasi

Kenampakan fisik yang ada di permukaan bumi bagi negara yang luas dan memiliki kenampakan fisik beragam, satu kenampakan belum cukup dijadikan batas dengan satuan wilayah bersebelahan. Negara pulau, seperti: Selandia Baru, Filipina, Jepang, Inggris, dan negara-negara kecil di Samudera Pasifik cukup dengan satu kenampakan yaitu laut. Bahkan satu negara luas yaitu Australia (satu benua), batas wilayah cukup satu kenampakan, akan tetapi sekalipun luas negaranya kecil harus digunakan batas wilayah kombinasi. Negara-negara kecil di pantai barat benua Afrika menggunakan batas kombinasi kenampakan fisik dan buatan.

Penggunaan kenampakan fisik dan buatan tidak hanya untuk batas antar negara, tetapi juga digunakan untuk batas satuan wilayah yang ada dalam satu negara. Batas propinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, sering juga menggunakan batas-batas wilayah kombinasi.

Isu Perbatasan

Perihal perbatasan antar wilayah kekuasaan suatu kelompok manusia sudah ada hampir bersamaan dengan keberadaan manusia penghuni muka bumi.

Batas dimaksud tidak hanya sebagai kejelasan kekuasaan, tetapi juga digunakan untuk keamanan, seperti: Tembok Besar di China dan Benteng Kerajaan di Pulau Jawa merupakan contoh yang hingga saat ini masih terdapat bukti-bukti fisiknya. Cerita pewayangan terkenal dalam lakon *Rebutan Kikis Tunggorono*, dibayangkan oleh sebagian orang yang tahu tentang cerita pewayangan sebagai perang memperebutkan daerah kekuasaan antara Raden Gatutkaca dengan Prabu Bomanarakasura.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak proklamasi kemerdekaan sudah ditetapkan batas-batasnya. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia selalu berusaha untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negaranya. Sebanyak 207 negara besar-kecil di dunia masing-masing sudah menetapkan batas-batasnya (Population Reference Bureau, 2004 : 2). Semua itu dalam rangka memperoleh kepastian hukum oleh negara tetangga maupun dunia internasional, sementara itu dalam setiap negara menetapkan batas wilayah juga semakin penting. Batas propinsi, kabupaten, kecamatan, desa, dan dukuh makin diperlukan dalam rangka otonomi daerah. Pemekaran propinsi, peningkatan status dari kabupaten menjadi propinsi, beberapa kelurahan menjadi kecamatan, beberapa kecamatan menjadi kabupaten sedang terjadi di Indonesia saat ini, sekalipun terdapat dalam satuan wilayah pemerintahan (kabupaten) penetapan maupun pergeseran letak batas ditanggapi oleh penduduk setempat dalam nada pro dan kontra yang memerlukan tindakan arif.

Contoh:

Warga masyarakat kecamatan bagian selatan Kabupaten Semarang yang berdekatan dengan Kota Salatiga berkeinginan bergabung dengan Kota Salatiga. Keinginan tersebut mendapat respon positif dari DPRD Kota Salatiga dengan pernyataan:

.... kami siap memberi kompensasi kepada pemerintah Kabupaten Semarang, apabila wilayah kecamatan bagian selatan bergabung menjadi bagian pemerintah Kota Salatiga. Soal bentuk kompensasi itu tergantung kesepakatan kedua belah pihak (Kedaulatan Rakyat, 15 Mei 2006 : 9).

Selang beberapa hari, DPRD Kabupaten Semarang telah menyampaikan tanggapan bernada keras:

.... tidak mungkin lima kecamatan di Kabupaten Semarang yang terletak di sebelah selatan kali Tuntang bergabung ke Pemkot Salatiga. Jika penggabungan itu dimungkinkan tentu akan memerlukan proses yang panjang karena harus mengubah peraturan perundangan yang ada (Kedaulatan Rakyat, 18 Mei 2006 : 9).

Dengan demikian, jelas bahwa perbatasan menjadi sangat penting pada saat ada kepentingan tertentu, baik oleh kelompok orang atau pemerintah/negara. Tidak jarang terjadi sengketa yang berkepanjangan melibatkan badan-badan internasional, seperti kasus Pulau Busang di Propinsi Kalimantan Timur dengan negara Malaysia beberapa tahun lalu (2005) dan celah laut perbatasan Indonesia-Australia-Timur Leste. Demikian pula kasus-kasus pelintas batas antara Propinsi Kalimantan Barat dengan negara bagian Serawak, Propinsi Papua dengan Papua New Guinea dan perbatasan Palestina dengan Israel dengan sengketa tepi barat-jalur Gaza yang berkepanjangan.

Perbatasan semakin rumit pada saat menyangkut kekayaan alam yang terdapat pada daerah perbatasan, maupun harus melintasi perbatasan. Sumber air bersih untuk pemenuhan kebutuhan kota tidak jarang berada di propinsi atau kabupaten lain. Kota Yogyakarta mendapatkan air bersih dari Kabupaten Sleman, demikian pula Kota Malang memperoleh air bersih dari Kabupaten Malang bagian utara, sebaliknya kiriman banjir dari Kabupaten Bogor ke Ibukota Jakarta menjadi berita hangat tiap musim penghujan. Setelah digulirkan otonomi daerah, masing-masing satuan wilayah mengelola sendiri semua kekayaan yang dimiliki dalam rangka perolehan PAD. Oleh karena itu persoalan perbatasan menjadi penting pada saat menyangkut kekayaan alam, keamanan, penyakit, dan pendapatan daerah.

Pada era keterbukaan dewasa ini, batas-batas antar negara menjadi sangat rentan. Pelayaran, penerbangan, dan komunikasi internasional menjadi kebutuhan mendesak. Pengkotakan satuan

wilayah menjadi kabur, apalagi keinginan isolasi mustahil dilakukan. Saling ketergantungan antar wilayah dan negara menjadi semakin meningkat tajam, terminologi barat-timur yang sudah dikenal sejak ratusan tahun yang lalu, demikian pula sebutan utara-kaya dan selatan-miskin (Laporan Brandt, 1980 dalam Dickinson, 1986 : 2).

Laporan Brandt tidak mengacu pada garis lintang, tetapi berdasar kekayaan warga negaranya. Oleh sebab itu sekalipun berada di utara garis khatulistiwa karena tergolong negara miskin, tetap dimasukkan anggota negara selatan. Demikian pula penamaan barat (maju) - timur (belum maju) juga tidak berdasar garis bujur 0° . Negara yang termasuk barat (maju) terdapat di Eropa dan Amerika Utara. Negara-negara di Eropa sebagian besar berada di timur dari 0° garis bujur. Penamaan tersebut menjadi rancu apabila dihubungkan dengan konsep arah dalam geografi, karena itu guru harus hati-hati pada saat menjelaskan konsep arah tersebut kepada siswa.

Beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pembahasan tentang batas wilayah kaitannya dengan kedaulatan negara adalah:

- a. Kepastian hukum dalam hubungan dengan kartu tanda penduduk, surat ijin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan bermotor, surat ijin tinggal, dan keperluan lain berkait dengan batas kewilayahan serta hak pilih dan dipilih.
- b. Sumber alam, hulu sungai terdapat di negara lain, seperti: Sungai Nil, Sungai Indus, dan Sungai Rein.
- c. Penetapan jenis batas yang digunakan, batas berupa sungai sering menimbulkan persoalan terutama di muara, misalnya: sering terjadinya pergeseran aliran pada muara (muara Sungai Opak, Sungai Progo di Propinsi D.I. Yogyakarta).

Dalam keadaan aman dan damai perbatasan kurang menarik dibahas, tetapi pada saat perang ada kepentingan politik, penguasaan kekayaan alam, ekonomi, penyakit, dan perbatasan sehingga menjadi hangat untuk dibicarakan. Berjangkitnya jenis penyakit tertentu, seperti flu burung menyebabkan daerah yang berdekatan cepat-cepat mengambil tindakan dan segera mengumumkan daerahnya bebas flu burung atau jenis penyakit yang lain.

Penutup

Pembahasan tentang batas wilayah menjadi penting tidak hanya bagi studi geografi, tetapi bidang-bidang keilmuan yang lain juga berkepentingan. Terkait dengan keamanan, ketertiban, ekonomi, politik, dan budaya, tidak sedikit yang sukar untuk ditetapkan. Batas negara sebagai kesatuan kedaulatan sering dilampaui pada saat menetapkan batas budaya, ekonomi, persebaran penduduk, dan persebaran kekayaan alam.

Guru perlu hati-hati menjelaskan kepada siswanya atau siapa saja tentang batas wilayah. Sedapat mungkin setiap penyebutan batas wilayah menggunakan referensi tertentu. Dasar administrasi pemerintahan berbeda dengan dasar ekonomi dan budaya, oleh karena itu penggunaan batas harus sesuai dengan materi yang diajarkan. Kesalahan dalam penyebutan batas akan menimbulkan kesalahan pemahaman, bahkan perselisihan yang akibatnya sangat jauh.

Daftar Pustaka

- Barbara Ward & Rene Dubos. 1976. *Hanya Satu Bumi, Judul Asli: Only One Earth*. Bandung: Lembaga Ekologi Universitas Pajajaran.
- Freeman Otis W., Ralph, H.F. 1949. *Essential of Geography*. New York: Mac Graw Hill Book Company Inc.
- Getis A., Getis J., Fellmann J. 1988. *Introduction to Geography*. Iowa: Wim C. Brown Publisher.
- Harm J., De Bly and Peter, O Muller. 1985. *Geography Regions and Concepts*. New York: John Wiley & Sons.

Kedaulatan Rakyat. 2006. *Ed: Wilayah DIY Menyempit*. Yogyakarta: Penerbit KR, Tanggal 2 November 2006.

----- . 2006. *Ed: Tak Mungkin 5 (Lima) Kecamatan Gabung Salatiga*. Yogyakarta: Penerbit KR, Tanggal 19 Mei 2006.

----- . 2006. *Ed: DPRD Siap Beri Kompensasi ke Pemkab Yogyakarta*. Yogyakarta: Penerbit KR, Tanggal 15 Mei 2006.

Kuntjaraningrat. 1974. *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia.

Munadjat Danusaputro St. 1980. *Wawasan Nusantara*. Bandung: Bandung Alumni.

Population Reference Bureau. 2004. *World Population Reference*. Bureau Washington DC.